

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : FUNGSI COMMERCIAL PAPER SEBAGAI ALTERNATIF  
SUMBER PEMBIAYAAN BAGI DUNIA USAHA

Ketua Peneliti : LINA HASTUTI

Anggota Peneliti : H. Samzari Boentoro  
Sarwirini  
L. Budi Kagramanto  
Trisadini P. Usanti

Fakultas : Hukum - Unair

Sumber biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas  
Universitas Airlangga Tahun 1996/1997  
SK Rektor Nomor : 6229/JO3/PL/1996  
T a n g g a l : 1 Agustus 1996

---

Commercial paper atau surat berharga komersial, sebenarnya merupakan suatu instrumen yang dipraktekkan di pasar uang, yang kemudian diperluas ruang jelajahnya ke bidang pasar modal. Bagi hukum dan bisnis di Indonesia instrumen hutang ini merupakan produk baru dan terbilang canggih, sehingga seluk beluk mengenai commercial paper ini belum banyak diketahui oleh masyarakat bisnis. Terlebih lagi bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang hukum, dimana aspek-aspek yuridisnya belum tertata dan belum jelas kualifikasinya.

Sebagai salah satu produk baru, sudah barang tentu eksistensi commercial paper pada akhirnya banyak bersentuhan dengan hukum konvensional, karena sebagian dari kaidah hukum yang digunakan masih merupakan produk hukum kolonial yang dituangkan dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD).

Secara yuridis instrumen commercial paper ini mempunyai dua wajah ganda atau ibarat pedang bermata dua, dimana di satu sisi instrumen tadi diatur oleh hukum privat, sehingga dalam banyak hal bukan merupakan hukum memaksa/pelengkap (voluntary rule). Atau dapat dikatakan bahwa sebagai instrumen hutang, maka penampilan commercial paper dalam bentuk hukum privat inilah yang merupakan prototipe CP yang sesungguhnya, jika ditinjau dari segi yuridisnya.

Dilain sisi, hukum yang mengatur mengenai instrumen surat hutang ini juga memiliki elemen-elemen hukum publik, sehingga merupakan hukum yang memaksa sifatnya (mandatory rule). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penampilan hukum publik dari commercial paper ini lebih merupakan bentuk stereotip, yang dalam implementasi pengaturannya banyak menyangkut aspek perbankan, pasar uang dan bahkan aspek pasar modal. Penampilan commercial paper dalam hukum publik berkait erat dengan kepentingan masyarakat, misalnya mengenai perlindungan bagi masyarakat investor, bidang moneter, lalu lintas devisa dan administrasi negara.

Penampilan commercial paper dalam bentuk ganda ini dari segi yuridis menjadi kabur. Jika ditinjau lebih lanjut commercial paper ini dapat diartikan sebagai suatu obligasi jangka pendek dengan waktu jatuh tempo antara 2 hingga 270 hari yang dikeluarkan oleh bank/perusahaan kepada pihak investor yang mempunyai uang cash/tunai. Menurut SK. Direksi BI No. 28/52/KEP/DIR, tanggal 11 Agustus 1995 yang dimaksud dengan commercial paper adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek berjangka waktu pendek serta diperdagangkan dengan sistem diskonto.

Oleh sebab itu penerbitan commercial paper dewasa ini sangat diharapkan oleh dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dari hari ke hari makin meningkat perkembangannya. Keterlibatan kalangan perbankan dalam penerbitan commercial paper sangat besar karena penetapan persyaratan penerbitannya harus disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian bank (prudentials banking) guna mengurangi kemungkinan risiko yang ditanggung oleh pihak bank.

Sebagai akibat di atas, maka dapat diketengahkan beberapa permasalahan yang berkait dengan fungsi commercial paper sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha, yang antara lain :

- a. Manfaat apa yang diperoleh pengguna commercial paper dalam rangka mengembangkan dunia usahanya ?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh perusahaan bukan bank serta langkah-langkah apa yang diambil oleh perusahaan bukan bank dalam mengantisipasi berbagai kendala sehubungan dengan penerbitan commercial paper dalam praktek ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat commercial paper bagi pengembangan dunia usaha, dimana CP ini merupakan salah satu sumber pembiayaan. Disamping itu penelittian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh perusahaan bukan bank dalam menerbitkan commercial paper (CP) tersebut.

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis dengan menggunakan metode induktif. Data yang dipergunakan sebagai acuan adalah datta primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (bersifat terbuka dan tertutup) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini rencananya akan diambil 10 - 15 orang pengguna commercial paper sebagai sample, serta petugas/karyawan perusahaan bukan bank mau[pun bank dan perusahaan efek serta pejabat dari BI Surabaya. Sedangkan lokasi dari perusahaan bukan bank serta bank dan perusahaan efek yang akan diteliti adalah di kota Surabaya dan Malang.

Kemudian data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan antara lain buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut, makalah seminar, surat kabar, berbagai tulisan di majalah ilmiah serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Selanjutnya dari data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif serta saran-saran yang bersifat membangun. Dalam penelitian ini tidak digunakan metode perhitungan.

- Kesimpulan :

Commercial paper telah menjadi sarana pembiayaan serta infestasi yang menguntungkan bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia. Oleh sebab itu pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi akibat penerbitan CP dalam bentuk promes keada pembawa harus dapat diatasi secara cepat.

Commercial paper belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, oleh karenanya CP harus dicari kesamaannya dengan warkat-warkat yang diatur dalam perundang-undangan yang telah ada seperti dalam buku I Bab 6 bagian 13 KUHD dan buku pertama Bab 7 bagian 2.

Selain itu commercial paper diatur dalam SK Direksi BI No. 28/52/KEP/DIR, tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial melalui Bank Umum di Indonesia.

- Saran :

Selama KUHD masih berlaku, maka CP tetap berbentuk promes atas nama atau pengganti yang peralihannya melalui endorsemen blanko.

Pemerintah hendaknya segera menerbitkan UU yang mengizinkan promes kepada pembawa (atas tunjuk) sekaligus dengan peraturan-peraturan yang melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi CP bearer notes.

Untuk CP bearer notes yang terlanjur beredar maka pemerintah memberikan dispensasi untuk menghalalkannya.

Seyogyanya penerbitan dan peredaran CP bearer notes dilarang karena akan merugikan perkembangan dunia usaha di Indonesia.